

KEGIATAN DPR-RI AWAL AGUSTUS 2012

Kegiatan DPR pada awal Agustus Masa Reses Masa Persidangan IV 2011-2012, tepatnya sejak Pidato Penutupan tanggal 13 Juli yang lalu. Masa Persidangan I tahun 2012-2013 baru akan dimulai pada 16 Agustus 2012 yang akan datang. Meskipun Masa Reses, pada awal Agustus ini, Dewan tetap fokus pada kegiatan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, utamanya dalam melakukan kunjungan ke daerah (Kunker). Berikut ini ringkasan jadwal acara Masa Sidang I, jadwal pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan kegiatan *parliamentary diplomacy* oleh DPR minggu ini.

Jadwal Acara Rapat DPR Masa Sidang I

Kebijakan Umum Jadwal Acara Rapat DPR-RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013 terdiri dari: *Alokasi Waktu Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013 dan Karakteristik Kegiatan dalam Masa Sidang.*

Alokasi Waktu Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013 terdiri dari: [1] Kegiatan Dewan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013, akan dilaksanakan mulai tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan 25 Oktober 2012, berjumlah 47 (empat puluh tujuh) hari kerja atau 71 (tujuh puluh satu) hari kalender. [2] Reses Masa Persidangan I akan dimulai tanggal 26 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 November 2012 berjumlah 13 (tiga belas) hari kerja atau 24 (dua puluh empat) hari kalender. Sedangkan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2012-2013 akan dibuka pada tanggal 19 November 2012.

Karakteristik: [1] Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013 akan dibuka pada Hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 dengan agenda: Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 67, dan Rapat Paripurna DPR RI dengan acara: Pidato Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013 dan Pengantar/Keterangan Presiden atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2013 beserta Nota Keuangannya.

[2] Pada permulaan Tahun Sidang ini diacarakan Penetapan Susunan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi dalam Alat-alat Kelengkapan DPR RI (Komisi, Baleg, BURT, BKSAP, Badan Kehormatan, BAMUS, BAKN dan Badan Anggaran).

[3] Tugas Bidang Anggaran adalah: [a] Pasal 15 UU No-

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Alie



mor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan Pemerintah Pusat mengajukan RUU tentang APBN kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya; [b] Membahas RKA-KL Tahun 2013. Sesuai dengan Siklus dan Mekanisme Pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2013 pada Minggu I sampai dengan Minggu IV September 2012 Komisi-komisi akan melakukan Rapat Kerja dengan pasangan kerjanya masing-masing untuk membahas RKA-KL tersebut.

[4] Tugas Bidang Legislasi adalah: [a] Menyelesaikan pembahasan RUU-RUU yang sedang ditangani AKD; [b] Komisi-komisi/Baleg menyusun RUU usul inisiatif sesuai prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2012; dan [c] Kegiatan dalam bidang legislasi lainnya.

[5] Tugas Bidang Pengawasan adalah: [a] Pelaksanaan tugas Tim, yaitu: Tim Pengawas Tindaklanjut Rekomendasi Panitia Angket DPR RI tentang Pengusutan Kasus Bank Century; Tim Pemantau Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; dan Tim Pengawas terhadap Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria; dan [b] Kegiatan dalam bidang pengawasan lainnya sesuai ketentuan perundangan.

[6] Permasalahan lainnya yang mendesak untuk segera ditangani/diselesaikan oleh Alat Kelengkapan Dewan yang terkait, yaitu: Pembahasan Persetujuan Calon Anggota KPPU Masa Jabatan 2011-2016; Pembahasan Pertimbangan Calon Anggota KPHI (Pengganti); Pembahasan Persetujuan Calon Hakim Agung; dan Memberikan pertimbangan terhadap Calon Duta Besar Negara Sahabat.

[7] Sesuai dengan karakteristik rapat pada Masa Persi-

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Djaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Dwi Maryanto, S.Sos (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Dadang Prayitna, S.IP.,MH (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto,S.Sos; Iwan Armanias; Suciati,S.Sos; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Eka Hindra; Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

dangan I, maka: [a] Rencana Kegiatan fungsi Anggaran dan Pengawasan dialokasikan $\pm 50\%$ dari waktu yang tersedia, sedangkan rencana kegiatan Fungsi Legislasi dialokasikan $\pm 50\%$ dari waktu yang tersedia; dan [b] Fokus kegiatan per sesi sesuai dengan jadwal, namun demikian masih dapat berubah sesuai dengan kebutuhan.

Pelaksanaan Fungsi Legislasi

RUU dalam proses pembahasan, ditangani oleh Komisi-Komisi, Panitia Khusus dan Badan Legislasi. Antara lain: [1] Komisi I menangani RUU Industri Pertahanan dan Keamanan, RUU tentang Veteran RI. [2] Komisi II menangani RUU tentang Keistimewaan Provinsi DIY, RUU tentang Aparatur Sipil Negara. [3] Komisi III menangani RUU tentang Kejaksaan RI dan RUU tentang Mahkamah Agung. [4] Komisi IV menangani RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L), RUU tentang Pangan. [5] Komisi V menangani RUU tentang Jalan. [6] Komisi VI menangani RUU tentang Koperasi dan RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro. [7] Komisi VII menangani RUU tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Nagoya Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati), dan RUU tentang Pengesahan *Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade* (Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional). [8] Komisi VIII menangani RUU tentang Jaminan Produk Halal. [9] Komisi X menangani RUU tentang Pendidikan Kedokteran. [10] Komisi XI menangani RUU tentang Pengurusan

Piutang Negara dan Piutang Daerah. [11] Badan Legislasi menangani RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. [12] Pansus menangani RUU tentang Desa, RUU tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, RUU tentang Jabatan Notaris, RUU tentang Organisasi Masyarakat (perubahan UU No. 8 tahun 1985). [3] Badan Anggaran menangani RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2011.

Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Pelaksanaan fungsi anggaran Masa Sidang I ini akan membahas RUU APBN 2013 beserta Nota Keuangannya dan Dokumen Pendukung yang akan disampaikan oleh Presiden 16 Agustus 2012.

Adapun jadwal pembahasan RAPBN terdiri atas 5 macam kegiatan, yaitu: [1] Pembahasan RKP dan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN, [2] Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN, [3] RUU tentang Perubahan APBN (pembahasan selama 1 bulan sejak RUU tersebut diajukan oleh Pemerintah), [4] RUU tentang APBN, dan [5] RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN.

Siklus Pembahasan RAPBN dimulai dengan: [1] pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN (antara 20 Mei-Juli), [2] pembahasan RUU APBN (16 Agustus-akhir Oktober), [3] pelaksanaan APBN (1 Januari-31 Desember tahun berikutnya), [4] Laporan Realisasi semester I dan Prognosis Semester II (Juli-Agustus), [5] RUU Perubahan APBN, pembahasannya paling lama 1 bulan dalam Masa Sidang setelah RUU APBN disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR, [6] RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN, disampaikan setelah 6 bulan pelaksanaan APBN berakhir dan dibahas paling lama 3 bulan sejak disampaikan.

Alur pembahasan dalam RAPBN 2013 dimulai dengan:



Pimpinan DPR RI saat memimpin Sidang Paripurna DPR

[1] Rapat Paripurna 16 Agustus 2012, pengajuan RUU APBN 2013 oleh Presiden kepada DPR; [2] Rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi atas RUU APBN 2013; [3] Rapat Paripurna jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi; [4] Rapat Kerja Komisi I-XI dengan mitranya, membahas alokasi anggaran untuk program dan kegiatan K/L dan menyampaikannya kepada Badan Anggaran secara tertulis, (sebelum itu Pimpinan DPR memberitahukan rencana pembahasan RAPBN kepada DPD dan DPD menyampaikan pertimbangan 14 hari sebelum diambil keputusan); [5] Rapat Internal Badan Anggaran untuk membahas hasil Rapat Kerja Komisi I-XI dengan mitra kerjanya dalam rangka pembahasan RKA K/L; [6] Rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan, Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur BI; [7] Rapat Paripurna pengambilan keputusan tingkat II atas RUU APBN 2013 dengan agenda penyampaian laporan berisi proses pembahasan pembicaraan tingkat I oleh Pimpinan Badan Anggaran, pernyataan persetujuan dari tiap fraksi secara lisan yang disampaikan kepada Rapat Paripurna, dan pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakili.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan, dalam Masa Reses, diwujudkan dalam bentuk kunjungan kerja (Kunker) Komisi ke daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing Komisi, dan akan dilaporkan pada buletin Parlemen yang akan datang.

Diplomasi Parlemen

Wakil Ketua DPR Drs. H. Priyo Budi Santoso disertai 7 Anggota DPR RI lainnya yakni H. Hayono Isman, S.IP, Nurul Arifin, S.IP, M.Si, DR. M. Azis Syamsuddin, S.H, H. Suhartono Wijaya, SE., MBA, Taslim, S.Si, H. Aboe Bakar Al-Habsy, SE dan Dr. Hj. Nova Riyanti Yusuf, SpKJ telah berkunjung ke Los Angeles, Amerika Serikat pada 6 – 8 Juli 2012 untuk menghadiri *Congress of Indonesian Diaspora (CID)* atau Kongres



Ketua DPR RI Marzuki Alie

Diaspora Indonesia. Delegasi DPR-RI telah berbicara dan mendengar aspirasi dari Diaspora Indonesia tentang keinginan memperoleh Kewarganegaraan Ganda. Bahkan, di dalam kesempatan tersebut Priyo Budi Santoso yang juga menjabat sebagai Ketua Kaukus DPR-RI untuk Amerika Serikat menerima Petisi Kewarganegaraan Ganda yang telah ditandatangani oleh 5.500 orang yang 90% nya adalah WNI.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, mengatakan bahwa kebijakan keimigrasian dan kewarganegaraan bukanlah sekedar kebijakan *inward looking* yang mengatur urusan paspor dan visa semata. Kebijakan tersebut jauh lebih luas karena di dalamnya mencakup interaksi sosial, politik, dan ekonomi sebuah negara. Karena itu, masalah keimigrasian dan kewarganegaraan harus dilihat dalam sudut pandang yang lebih komprehensif, yakni urgensi kepentingan ekonomi nasional yang dihadapkan dengan derasnya arus globalisasi dan keutamaan untuk menegakkan nilai-nilai HAM universal.

Terkait dengan isu permintaan suaka oleh beberapa WNI di New Jersey, Amerika Serikat beberapa waktu lalu, Ketua Kaukus DPR RI untuk Amerika Serikat ini secara tegas menggarisbawahi bahwa Indonesia sekarang sudah berubah secara dramatis ke arah yang lebih baik dan sangat demokratis sejak tahun 1998. Menurut Priyo Budi Santoso, permintaan suaka karena alasan keamanan adalah tidak benar, dan hanya akan mengusik rasa nasionalisme kita serta mencederai upaya pencapaian kepentingan nasional.

CID ini merupakan langkah awal bagi Indonesia untuk menciptakan sejarah baru. Konggres ini adalah ajang pertemuan, tukar pandangan dan gagasan serta diskusi terbuka bagi setiap individu anak bangsa Indonesia yang berada di luar negeri dengan tidak dibedakan berdasarkan etnis, suku bangsa dan agama. Bahkan, warga asing pencinta Indonesia atau mempunyai hubungan keluarga dengan warga Indonesia juga merupakan bagian dari diaspora Indonesia.

CID telah dihadiri oleh 2067 peserta yang diantaranya merupakan perwakilan Diaspora Indonesia dari Australia, Azerbaijan, Belanda, Chile, Cina, Inggris, Italia, Jerman, Jepang, Kanada, Kaledonia Baru, Korea Selatan, Myanmar, Meksiko, Malaysia, Mauritius, Perancis, Qatar, Saudi Arabia, Suriname, Singapura, Selandia Baru, Turki dan Vietnam. Selain itu, CID juga menghadirkan 87 pembicara diantaranya adalah Wakil Ketua DPR RI/Ketua Kaukus DPR RI untuk Amerika Serikat, Drs. H. Priyo Budi Santoso; Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. M. Azis Syamsuddin, S.H; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. Dr. Mohammad Nuh. DEA; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dr. Mari Elka Pangestu; Presiden CT Corp/Komite Ekonomi Nasional, Chaerul Tanjung; Presiden Marvel Technology, Dr. Sehat Sutardja, Rektor Universitas Paramadina, Anies R. Baswedan, Ph.D; dll.

Selanjutnya, Wakil Ketua DPR RI selaku Ketua Kaukus DPR RI untuk Amerika Serikat ini memastikan bahwa Delegasi Kaukus akan membawa aspirasi Kewarganegaraan Ganda ini ke Jakarta dan mendorong DPR RI untuk berunding dengan Presiden untuk secara bersama-sama mencari solusi atas permasalahan tersebut.**

DPR Apresiasi Keberanian KPK Geledah Instansi Kepolisian

DPR Mengapresiasi keberanian KPK menggeledah instansi Kepolisian dan menetapkan salah satu jenderal bintang dua Polri sebagai tersangka dalam kasus pengadaan Simulator SIM.

“Kita mengapresiasi keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menggeledah instansi kepolisian. KPK juga mengagetkan dan sekaligus juga memberikan rasa percaya dengan bekerja secara profesional,” papar Anggota DPR Martin Hutabarat kepada wartawan baru-baru ini.

Menurutnya, selama ini stigma KPK di hadapan publik kurang baik. KPK dinilai tebang pilih dan ketika bersinggungan dengan instansi penegak hukum, KPK tidak menunjukkan taringnya. Namun dengan penggeledahan semalam, KPK telah menunjukkan keberaniannya. “Nah ini kan mengagetkan dan sekaligus juga memberikan rasa percaya bahwa KPK bisa secara profesional melaksanakan

tugasnya,” paparnya.

Untuk itu, kinerja KPK perlu diapresiasi dan kepolisian diharapkan dapat bekerja sama dalam menuntaskan kasus pengadaan simulator pengemudi dan mobil di Korlantas Mabes Polri anggaran 2011. “Oleh karena itu kita Apresiasi dan kita harapkan agar supaya kepolisian pun bisa kerjasama dengan KPK. Karena memang merupakan tugas kita bersama untuk melakukan pembersihan agar Siapa pun harus mempertanggungjawabkan dugaan penyalahgunaan kekuasaan,”

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf, dia mengapresiasi keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan salah satu jenderal bintang dua Polri sebagai tersangka dalam kasus

pengadaan Simulator SIM. Polri diminta jangan menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK.

“Kami apresiasi keberanian KPK ini. Ini memang masuk dalam kewenangan KPK menyidik kasus korupsi yang dilakukan para penegak hukum, termasuk Polri.” Jelas Anggota Komisi I DPR RI ini

Muzzammil meminta agar Polri tidak menghalang-halangi proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. “Jika Polri tidak kooperatif maka ini bisa menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Wibawa Polri dihadapan publik akan semakin anjlok sehingga Polri tidak dipercayai lagi oleh masyarakat,” jelasnya.

Dia menambahkan, Polri sebaiknya menjaga wibawa penegak hukum dan menunjukkan dukungannya dalam pemberantasan korupsi, termasuk di dalam lembaganya sendiri. Publik sudah tahu yang terjadi hari ini melalui media massa. Jadi jangan ditutup-tutupi.

Untuk itu Muzzammil berharap semua pihak mendukung kinerja KPK dan jangan sekali-sekali melemahkan peran dan fungsi KPK, terutama fungsinya sebagai penyidik dalam kasus korupsi. “Jika fungsi penyidikannya dihapuskan maka KPK tidak akan lagi bertaji.” Ujarnya.

Kendati demikian, dia meminta agar semua pihak tetap menjunjung tinggi praduga tak bersalah kepada oknum perwira Polri yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sebelum adanya putusan hukum pengadilan yang berkekuatan tetap. “Sebelum ada putusan hukum pengadilan yang berkekuatan tetap maka kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah karena ini memang hak setiap warga negara, termasuk kepada aparat kepolisian.” Tutupnya. (parle)foto:parle



Anggota DPR Martin Hutabarat

Pemerintah Harus Berikan Special Tax Bagi Industri Pertahanan Nasional

Anggota DPR dari Partai Demokrat Yahya Sacawiria mengatakan, Pemerintah harus memberikan special tax terkait pembelian bahan baku atau bahan jadi untuk industri pertahanan nasional. "Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri ini dan akan kita perjuangkan di dalam RUU Industri Pertahanan nanti," paparnya di Gedung DPR RI, Jum'at (3/8).



Anggota DPR dari Partai Demokrat, Yahya Sacawiria

Menurutnya, Kementerian Keuangan harus memberikan ruang gerak bagi perkembangan industri pertahanan Indonesia. Selain itu, kita harapkan juga kedepannya bisa segera disusun SOP yang jelas terkait

pengembangan industri pertahanan.

Dia menambahkan, RUU Industri Pertahanan ini diharapkan tidak hanya untuk kepentingan TNI semata tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan

dan kebutuhan yang berada diluar TNI. "Prinsipnya Presiden telah memberikan satu garis bahwa TNI harus mendayagunakan atau istilahnya memanfaatkan industri pertahanan atau lebih eksklusif bahwa TNI harus menggunakan produk dalam negeri," terangnya.

Dia mengakui, Industri Pertahanan Nasional masih belum maksimal sesuai harapan kita semua. Pasalnya, tidak semua komponen dapat diproduksi di dalam negeri, namun harus didatangkan dari luar negeri.

Dia mengatakan, Industri Pertahanan harus bersinergi dengan industri penunjang yang dikelola oleh swasta. "Jika tidak didorong sinergi tersebut maka tidak ada satupun swasta yang memiliki minat untuk menanamkan modalnya di industri penunjang tersebut, dan diharapkan ini dapat memberikan tantangan bagi BUMN Industri Pertahanan kita," ujarnya. (si) foto:parle

Pemerintah Harus Tindak Tegas Pelaku Kartel

Pemerintah harus betul-betul menindak tegas pelaku kartel yang merusak komoditi pangan nasional terutama sembilan bahan pokok. Jika sembilan bahan pokok tidak dikendalikan dan diberikan pada mekanisme pasar bebas, maka Indonesia akan terus dihadapkan pada masalah pangan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Subagyo mengomentari masalah kelangkaan kedele yang terjadi beberapa hari lalu, saat dihubungi melalui telephone baru-baru ini.

Firman mengatakan, walaupun bea cukai untuk kedelai sudah diturunkan

sebesar 0 persen, namun kita sudah termakan dan terbawa oleh arus liberalisasi perdagangan. Sehingga komoditas-komoditas ini yang menguasai adalah pemain-pemain kartel.

Menurutnya, kebijakan 0% adalah suatu terobosan yang sifatnya instant, tapi ini tidak menyelesaikan

masalah karena yang menikmati adalah kartel. Ketika kebutuhan meningkat dan ditahan oleh pengepul maka akan terjadi gejolak harga.

Dalam hal ini, akan terdinegosiasi harga, kelompok-kelompok kartel mencari terobosan untuk biaya masuk. Ketika barang masuk harga masih

tinggi dan yang diuntungkan para pemain kartel. “Jadi yang diuntungkan ini adalah para pemain-pemain kartel dan bukan para petani ataupun rakyat kita,” katanya.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya dapat memproduksi sendiri kebutuhan sembilan bahan pokok. Firman meminta pemerintah membuat rencana kerja yang jelas dan transparan target-target kebutuhan pokok secara nasional.

Apalagi mengingat tahu dan tempe menjadi salah satu menu andalan masyarakat menengah kebawah. Kelangkaan ini membuat masyarakat menengah kebawah menjadi resah, karena tahu dan tempe menjadi bahan kebutuhan yang langka dan harganya meningkat drastis. Padahal tahu dan tempe sudah menjadi bahan pokok sehari-hari bagi masyarakat menengah kebawah.

Dengan adanya kenaikan harga kedelai yang melambung, tentunya sangat dirasakan masyarakat menengah kebawah yang memilih tempe dan tahu sebagai menu sehari-hari. Ke depan perlu segera dipikirkan bahan baku tahu dan tempe tidak dominan dari luar negeri, tapi dari hasil lokal.

Firman menambahkan, sebetulnya selama ini Komisi IV DPR sudah



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Subagyo

menerima asosiasi pengrajin tahu dan tempe. Dewan juga meminta kepada pemerintah agar secepatnya menangani masalah kedelai.

Saat ini, di beberapa wilayah sudah menaikkan harga tahu dan tempe. Kenaikan tersebut berkisar 30 persen yang awalnya dari Rp. 1.000 menjadi Rp. 1.500, untuk ukuran besar dari Rp. 3.000, menjadi Rp. 4.000.

Firman menegaskan, masalah pa-

ngan ini adalah masalah yang sangat fundamental, sebagai negara agraris tentunya kedepan harus melangkah sebenar-benarnya baik DPR maupun Pemerintah untuk meningkatkan sistem pertanian. Sehingga Indonesia tidak akan menjadi negara yang bergantung dari produk-produk pangan negara-negara lain yang berbentuk import. (tt,rf).foto:wy/parle

Polri Jangan Terkesan Halangi KPK

Anggota Komisi III DPR RI Syarifudin Sudding meminta Kapolri menjelaskan langkah anak buahnya yang terkesan menghalangi penggeledahan yang dilakukan Penyidik KPK di Korps Lalu Lintas Markas Besar Polri. Baginya semua pihak harus mendukung proses penyelidikan dan penggeledahan yang dilakukan KPK sebagai bentuk komitmen terhadap pemberantasan korupsi.

“Pak Timur Pradopo harus jelaskan ini pada publik. Kapolri seharusnya membuka diri, jangan ada kesan menghalang-halangi proses penyelidikan, proses penggeledahan yang dilakukan KPK terhadap institusinya,” ujar wakil rakyat dari FP Hanura ini di Jakarta, Selasa (31/7/12).

Ia memberi apresiasi terhadap proses hukum yang telah dilakukan KPK untuk mengungkap dugaan korupsi pengadaan alat simulator uji SIM yang merugikan negara miliaran rupiah. Penetapan status tersangka

kepada mantan Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Pol. Djoko Susilo diharapkan sudah sesuai prosedur sehingga mempercepat penyelesaian kasus dan upaya ‘bersih-bersih’ di institusi kepolisian.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsudin meminta segenap pihak tidak terlalu cepat menilai telah terjadi konflik diantara dua institusi penegak hukum ini. “Jangan di-blame dulu polisinya atau KPK-nya, mari kita lihat dulu secara hukum acara. Kita baca dokumen dulu, lihat administrasi, dari

situ kelihatan siapa yang menyimpang, itu yang ditindak,” tandasnya.

Ia mengaku sudah cukup lama mendengar dugaan korupsi pengadaan alat simulator uji pembuatan SIM ini, tetapi saat itu belum ada langkah nyata dari aparat. Politisi Parta Golkar ini sepakat kasus ini harus dibuka seterang-terangnya.

Proses penggeledahan Kantor Korps Lalu Lintas Mabes Polri di Jalan M.T. Haryono Jakarta berlangsung cukup panjang sejak Senin sore (30/7) sampai Selasa malam. Penyidik sempat



Anggota Komisi III DPR RI Syarifudin Sundding

disuruh berhenti memeriksa. Barang bukti yang disita diminta diturunkan kembali dari mobil penyidik KPK.

Untuk menyelesaikan kesalahan komunikasi pada saat penggeledahan, tiga pimpinan KPK mendatangi lokasi. Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua Bambang Widjoyanto dan Busro Muqoddas melakukan pembicaraan dengan Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Sutarmam. “Awalnya sebenarnya tidak ada masalah tapi ternyata ada emergency call saya memutuskan kembali ke KPK untuk menyelesaikan,” jelas Bambang. (iky)

Pramono Anung: Pergantian Pimpinan Banggar Tidak Menghasilkan Perubahan Signifikan

Pergantian Ketua Badan Anggaran DPR tidak akan menghasilkan perubahan signifikan selama tak ada perbaikan sistem di internal Badan Anggaran, juga tidak berpengaruh terhadap jumlah anggaran karena Penyusun RAPBN itu Pemerintah, bukan DPR.



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung

“Banggar itu hanya menyempurkan, menyusun, mengurangi, mengalokasikan, dan membuat match RAPBN dengan usulan komisi. Jadi Ketua Banggar mau diganti seribu kali pun tidak akan berpengaruh,” ungkap Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (2/8).

Lebih lanjut ia mengatakan, meski Banggar merupakan bagian dari DPR, namun Pramono menekankan pentingnya DPR mengontrol Banggar.

“Kalau dulu seluruh materi harus mendapat persetujuan komisi, baru dibawa ke Banggar. Tapi sekarang kan tidak. Komisi justru mengikuti Banggar karena kewenangan awal penyusunan anggaran ada di pemerintah,” kata Pramono.

“Jadi praktis hampir 95 persen yang menyusun anggaran pemerintah, dan begitu masuk ke DPR, Banggar hanya tambah kurang saja, tetapi tidak merubah struktur secara keseluruhan,” imbuh politisi PDIP itu.

Oleh karena itu pula, Pramono menyatakan perubahan Ketua Banggar tidak akan berpengaruh terhadap jumlah anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) karena penyusun RAPBN-P adalah pemerintah, bukan DPR.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto menyatakan fraksinya melakukan rotasi terhadap dua anggota mereka yang duduk di Banggar, yaitu Zulkarnaen Djabar dan Melchias Markus Mekeng. Keduanya diganti dari Banggar dengan alasan berbeda.

Posisi Mekeng sebagai Ketua Banggar pun bakal digantikan oleh anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Ahmadi Noor Supit.

Pramono menegaskan, pergantian Ketua Banggar merupakan kewenangan Golkar karena jabatan itu merupakan jatah fraksi terkait. “Itu sesuai kesepakatan awal yang sudah kami ketok, berdasarkan asas proporsionalitas,” katanya. (ddg)foto: wy/parle

Sekjen DPR RI Buka Bazar Ramadhan

Pada tahun ini untuk sekian kalinya sekjen DPR RI menyelenggarakan bazar ramadhan yang diperuntukkan bagi para karyawan yang berada di lingkungan DPR, MPR, dan DPD RI.

Pada tahun sebelumnya kegiatan ini diselenggarakan oleh Darma Wanita Sekjen DPR RI, namun pada kali ini Korpri Sekjen DPR RI mendapat kesempatan untuk menyelenggarakan bazar ramadhan tersebut.

Saat menyampaikan sambutannya, Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh mengatakan, kegiatan Bazar ini tercipta atas bentuk kepedulian Darma Wanita dan Korpri DPR RI terhadap kebutuhan Karyawan di lingkungan DPR RI, "Ini merupakan salah satu bentuk kegiatan Darma Wanita dan Korpri DPR RI, yang begitu aktif dalam kegiatan sosial masyarakat, terutama kegiatan sosial masyarakat di lingkungan DPR RI," paparnya di lobi Nusantara II, Rabu, (1/8).

Menurut Nining, produk yang dijual hendaknya terjangkau harganya dan sesuai dengan kebutuhan karyawan di lingkungan DPR RI. "Mudah-mudahan kegiatan seperti ini akan memberi dukungan dalam kegiatan-kegiatan sosial serupa selanjutnya," tambahnya

Nining juga mengatakan Kesekjenan akan terus memberikan dukungan terhadap kegiatan seperti ini walaupun tidak secara tertulis tapi secara langsung turut serta memberikan dukungan terhadap bazar ini. "Semoga acara yang diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat ini menjadi ajang promosi bagi para pengusaha kecil menengah untuk mengembangkan usahanya ke tingkat yang lebih baik lagi," terangnya.

Diakhir pidatonya sekjen DPR RI menyampaikan bahwa kegiatan ini harus tetap dilaksanakan di kemudian hari sebagai wujud kepedulian bagi seluruh karyawan di lingkungan DPR, MPR, dan DPD.

Ketua Panitia Penyelenggara Bazar Adrian mengatakan, Bazar tersebut diikuti oleh 80 peserta yang terdiri



Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh saat membuka Bazar Ramadhan di gedung Nusantara II DPR RI

dari 15 orang pegawai DPR, 5 orang pegawai MPR dan 60 orang peserta lainnya adalah masyarakat yang terdiri dari usaha kecil menengah, yang menyediakan berbagai bahan kebutuhan pokok seperti sandang dan pangan yang harganya cukup terjangkau bagi para karyawan di lingkungan sekjen DPR, MPR, dan DPD.

"Kegiatan bazar ramadhan ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun menjelang hari raya idul fitri untuk mengimbangi semakin meningkatnya beberapa kebutuhan barang pokok menjelang idul fitri yang cenderung memperlihatkan grafik meningkat dari tahun ketahun," kata Adrian.

Bazar yang diselenggarakan mulai dari tanggal 1-3 agustus yang bertempat di lantai dasar gedung

nusantara II menyajikan berbagai barang kebutuhan rumah tangga, mulai dari berbagai macam model baju batik, berbagai macam kue lebaran, sampai dengan perlengkapan memasak dan peralatan kebersihan.

Selain harga yang terjangkau selama bazar berlangsung, juga terdapat pemeriksaan cek darah gratis, yang tidak kalah menariknya, adanya potongan harga dari barang-barang tertentu yang berkualitas, seperti jaket dan celana jins, serta berkesempatan mendapatkan door prize menarik setiap pembelian barang minimal Rp.50.000. Kemudian Acara pembukaan bazar pada siang itu ditutup dengan pemukulan gong oleh Sekjen DPR RI dan dilanjutkan dengan pembacaan do'a oleh Amirudin. (ko/si) foto:wy/parle

Perlu Terobosan Untuk Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Jateng

Komisi X DPR RI meminta Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan terobosan untuk meningkatkan minat baca masyarakat Jateng, dengan melakukan penelitian apa penyebab dari rendahnya minat baca masyarakat di Jawa Tengah.



Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto (berdiri) saat memimpin kunjungan kerja Komisi X ke Provinsi Jawa Tengah

“ Hampir di setiap provinsi, setiap Komisi X DPR melakukan kunjungan kerja, hal yang disampaikan selalu masalah rendahnya minat baca masyarakat. Untuk itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mencari penyebab yang sebenarnya. “ kata Dedi Suwandi Gumelar saat Kunjungan Kerja Komisi X DPR, Rabu (18/7) yang dipimpin Ketua Komisi X Agus Hermanto.

Dalam kesempatan tersebut, Dedi juga menanyakan strategi komunikasi apa yang telah dilakukan Badan ini untuk menghadapi fenomena masyarakat yang kurang gemar masyarakat.

Dia mengusulkan, sebaiknya Badan Arsip dan Perpustakaan Jateng melakukan jemput bola meminta ijin gubernur/walikota maupun bupati untuk membuka gerai di depan mall. Di tempat keramaian seperti itu rasanya tepat mengajak masyarakat

berkunjung dan membaca. Tentunya, kata Dedi gerai tersebut dibuat semenarik mungkin dengan diiringi musik yang dapat mengundang orang datang ke tempat tersebut.

Dapat juga Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah bekerjasama membuat cafe yang nyaman, sehingga anak-anak muda betah nongkrong di situ sambil membaca buku-buku yang telah disediakan.

Dedi memprihatinkan, perpustakaan sekarang bukan menjadi tempat tujuan utama, kecuali jika seorang pelajar mau mengerjakan tugas sekolahnya atau seorang mahasiswa mau menyusun skripsi.

Perpustakaan diibaratkan sebagai jendela dunia, kita tentunya tidak menginginkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang miskin pengetahuan.

Menanggapi hal itu, Ketua Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jateng Andriani mengatakan, pihaknya

telah banyak melakukan terobosan-terobosan diantaranya membuka outlet mobil Tosa semacam mobil roda tiga untuk perpustakaan keliling di sepanjang jalan Pahlawan, Semarang. Terobosan ini ternyata cukup banyak peminatnya.

Selain itu, secara insidental menyelenggarakan pameran-pameran di setiap kabupaten/kota. Badan ini juga memberikan bantuan kepada sekitar 7.800 desa berupa rak dan buku-buku yang dipasang di tiap Balai Desa.

“Sekarang ini sudah mencapai 75 persen, di tahun 2013 kami berharap dapat selesai seluruhnya,” katanya.

Badan ini juga membantu pengadaan buku-buku di Pondok Pesantren dan di rumah sakit-rumah sakit menyediakan pojok baca.

Selain itu, bersama dengan organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi wanita di setiap organisasinya ada pojok baca.

Badan ini, lanjutnya juga menu-runkan para pustakawan untuk membantu pembinaan dan penataan di perpustakaan-perpustakaan termasuk khasanah bukunya.

Andriani menambahkan, untuk tahun 2012 Badan Arsip dan Perpustakaan Jateng mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 5,2 miliar termasuk pengadaan buku-buku dan rak-rak untuk desa-desa.

“Anggaran tersebut untuk meng-cover 35 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk kurang lebih 33 juta,” jelasnya.

Adapun buku-buku yang diminati masyarakat adalah buku teknologi menduduki urutan teratas, dan yang lainnya adalah buku tentang ilmu sosial, teknologi informasi, filsafat dan psikologi serta buku sejarah dan geografi. (tt) foto:parle

Dinas Sosial Harus Lebih Kreatif Dukung Anggaran Panti Jompo

Dinas Sosial di daerah harus bekerja lebih kreatif untuk mencari tambahan anggaran untuk Panti Jompo atau dikenal pula sebagai Panti Sosial Tresna Wredha (PSTW). Anggaran yang berasal dari APBN/D dinilai belum mencukupi untuk menopang kegiatan panti sehingga diperlukan upaya mencari sumber-sumber lain.



Anggota Komisi VIII DPR RI Inna Ammania saat berkunjung ke Panti Wredha di NTB dalam rangka kunjungan kerja Komisi VIII ke Propinsi NTB

“Kemensos baik di pusat maupun daerah perlu lebih kreatif misalnya di NTB ini menggandeng perusahaan sumber daya alam yang cukup banyak disini, sebagian dana CSR-nya bisa disalurkan ke Panti Wredha,” kata Inna Ammania anggota Komisi VIII/FPDIP saat mengunjungi PSTW Puspa Karna di Matarama, NTB, Selasa (17/7/12).

Bersama Tim Kunker Komisi VIII ia berdialog dengan penghuni panti yang berjumlah 85 orang, meninjau sarana dan prasarana. Dia mengaku prihatin karena aparalansia, belum mendapatkan pelayanan yang memadai. Di tempat ini tercatat penghuni tertua dengan usia 127 tahun. Sebagian tinggal dalam

kondisi sakit seperti stroke, rabun bahkan 10 orang diantaranya tidak dapat mengurus diri sendiri.

“10 orang ini kita tempatkan di ruang dan tempat tidur khusus, karena kondisinya mereka terkadang makan, buang air ditempat tidur yang sama. Seharusnya kita memakaikan popok khusus dewasa tapi apa daya anggaran tidak ada,” jelas M. Ramli kepala PSTW Puspa Karna.

Sayed Fuad Zakaria anggota Komisi VIII meminta pemerintah daerah turut memberikan perhatian kepada kondisi lansia yang notabene warga bangsa yang sudah tidak berdaya. Ia menyangankan fasilitas pendukung panti yang sudah tidak memadai dan

perlu perbaikan segera.

“Benar, kemensos dan dingsos perlu mengajak partisipasi kelompok masyarakat yang memang mampu, konglomerat, perusahaan untuk berperan serta. Siapkan program dan kemudahan untuk membantu. Saya yakin ada yang tergerak,” imbuh politisi dari FPG ini.

Ketua Tim Kunker, Mahrus Munir pada kesempatan itu menyalurkan bantuan Program Asistensi Sosial Lansia melalui LKS untuk pemenuhan dasar 85 orang senilai Rp.93.075.000,-. Dengan bantuan itu setiap penghuni panti akan memperoleh uang makan Rp.3000,-/hari selama satu tahun/365 hari. (iky) foto:parle

Presiden AIPA Bertemu Ketua Parlemen India

Presiden ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Marzuki Alie mengatakan, ASEAN mengajak India untuk mengintensifkan kerjasama dalam upaya menciptakan stabilitas kawasan, terutama dalam hal perdamaian dan peperangan melawan terorisme. Sebagai negara besar di Asia Selatan, India memiliki posisi strategis dalam mewujudkan stabilitas kawasan.

Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Alie saat bertemu dengan Ketua Lok Sabha (parlemen India) Meira Kumar, di gedung parlemen India. Senin (30/7).

India untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bersama.

“Kita telah berbuat banyak hal, termasuk menandatangani deklarasi bersama untuk kerjasama memerangi



Ketua DPR Marzuki Alie saat berkunjung ke parlemen India

Ikut mendampingi Marzuki dalam kesempatan itu antara lain pimpinan Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Surahman Hidayat dan Sidharto Danusubroto, serta perwakilan parlemen dari sejumlah negara ASEAN di antaranya Seng Han Thong dari Singapura, Winai Sompong dari Thailand dan Ngo Duc dari Vietnam.

Menurut Marzuki, ASEAN dan India telah mencapai kemajuan penting dalam membangun kerjasama antar-kawasan. Marzuki pun mengapresiasi partisipasi India dalam serangkaian pertemuan konsultatif dengan ASEAN, termasuk dalam ASEAN Regional Forum (ARF), maupun dalam pembuatan road map kerjasama jangka panjang ASEAN-

terorisme. Masih banyak lagi yang bisa kita lakukan,” ucap Marzuki.

Ketua DPR menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk terus memromosikan zona bebas senjata nuklir. Salah satu wujudnya adalah dengan ratifikasi Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT).

Marzuki mengatakan, Indonesia adalah negara terakhir di ASEAN yang telah meratifikasi CTBT. Karenanya pula, AIPA meminta setiap negara yang belum meratifikasi CTBT untuk segera meratifikasinya sebagai bagian dari komitmen untuk memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan. “Kami sepakat bahwa pada titik ini, di masa mendatang perdamaian dan stabilitas dunia berada di tangan



Ketua DPR Marzuki Alie saat isi buku tamu

parlemen,” ucapnya.

Dalam lawatannya ke India itu Marzuki juga menyampaikan apresiasi kepada pendiri India yang juga dikenal sebagai tokoh perdamaian dan anti-kekerasan, Mahatma Gandhi. Sebelum menemui kolega di parlemen India, Marzuki menyempatkan diri mengunjungi Raj Ghat, lokasi yang dijadikan tempat kremasi mayat Mahatma Gandhi. (Rud.Tvp) foto: parle

DPR Dukung Revitalisasi Bulog Sebagai Stabilisator Harga

Ketua DPR Marzuki Alie mendukung revitalisasi wewenang Bulog sebagai stabilisator harga berbagai komoditas pangan strategis. “Bulog sekarang harus diberikan wewenang sehingga dapat bergerak cepat mengambil kebijakan terkait harga kebutuhan pokok strategis,” paparnya saat Buka Puasa bersama di kediamannya Widya Chandra, baru-baru ini.

Menurutnya, saat harga jatuh dipasaran Bulog harus segera mengamankan harganya jangan sampai jatuh sehingga diharapkan tidak merugikan para petani. “Sekarang wewenang Bulog mulai diberikan secara perlahan, memang dahulu wewenangnya sempat berkurang karena kesepakatan Indonesia dengan IMF saat krisis moneter dulu,”ujarnya.

Sementara Anggota DPR RI Komisi IV Ma'mur Hasanuddin menilai rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan revitalisasi Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai stabilisator harga berbagai komoditas pangan strategis cukup baik, namun proses revitalisasi tersebut harus didukung infrastruktur, peraturan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.

“Rencana revitalisasi Bulog oleh pemerintah harus didukung dengan adanya manajemen organisasi memadai, infrastruktur yang baik, peraturan atau payung hukum yang jelas dan SDM yang berkualitas,”jelasnya.

Dengan bertambahnya peran dan fungsi Bulog yang direncanakan maka diperlukan infrastruktur baru yang disiapkan dengan matang, seperti pengadaan gudang untuk manajemen stok dan strategi tata niaga yang matang guna memahami dinamika pasar. Peran Bulog selama ini melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah, stabilisasi harga, menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan. Tercatat Bulog memiliki 26 Divisi regional (Divre), 101 Sub Divre, Kanlog 30 lokasi dan gudang penyimpanan yang hampir 463 lokasi di seluruh Indonesia.



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat di wawancara oleh wartawan membahas mengenai revitalisasi Bulog

Dengan jumlah SDM sebanyak 5025 orang, Bulog juga perlu segera berbenah dan meningkatkan kapasitasnya, karena kualitas SDM akan menentukan kinerja dan penerapan sistem yang efektif. “Bulog harus mampu melakukan langkah persiapan dan transformasi secara cepat mengenai rencana ini, mengingat Bulog selama ini masih memiliki banyak catatan buruk terkait stabilitas harga dan serapan beras.” tegas Ma'mur.

Dia menambahkan, revitalisasi Bulog harus di arahkan juga kepada optimalisasi serapan terhadap berbagai komoditas pangan lokal strategis, bukan hanya berbasis ketersediaan yang seringkali disalahartikan sebagai bentuk legalitas terhadap importasi oleh Bulog. Diharapkan dengan revitalisasi Bulog yang optimal dapat mencegah aksi spekulasi yang sering melakukan permainan harga terhadap komoditas pangan dan menghapuskan

beragam kartel yang merugikan petani lokal. “Payung hukum yang lebih komprehensif perlu dirumuskan segera oleh Pemerintah agar rencana ini berjalan dengan cepat, diharapkan fenomena melonjaknya harga komoditas pangan yang sangat tinggi dapat diminimalisir karena Bulog mampu berperan maksimal sebagai buffer stock,”tegas Ma'mur.

Selama ini melalui Keputusan presiden (Keppres) No 19 tahun 1998, ruang lingkup komoditas yang ditangani BULOG dipersempit, seiring dengan kesepakatan yang diambil oleh Pemerintah dengan pihak IMF yang tertuang dalam Letter of Intent (LoI). Dalam Keppres tersebut, tugas pokok BULOG dibatasi hanya untuk menangani komoditas beras. Sedangkan komoditas lain yang dikelola selama ini dilepaskan ke mekanisme pasar. (si) foto:parle

Dewan Minta Verifikasi Parpol Tak sekedar Formalitas

DPR meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menjadikan proses verifikasi partai politik (Parpol) menjadi peserta pemilihan umum (pemilu) hanya sebagai formalitas belaka. KPU harus objektif dan jangan sampai terbuka ruang adanya permainan dalam proses verifikasi tersebut.



Anggota Komisi II DPR RI Taufik Hidayat

“kejujuran harus dipegang teguh. Tanggungjawab secara etik. Jangan sampai ada tawar-menawar,” kata anggota Komisi II DPR Taufik Hidayat, Jakarta, Kamis (2/8).

Diketahui, penetapan Parpol yang menjadi peserta pemilu 2014 dijadwalkan berlangsung Desember 2012 setelah proses pendaftaran dibuka 9 Agustus. Terhadap proses verifikasi, KPU telah membentuk tim yang beranggotakan 128 orang dan tiap dua orang bertanggungjawab atas satu parpol.

Menurut Taufiq, harus ada keseriusan dari KPU dalam melakukan proses verifikasi parpol. Kesan formalitas yang selama ini dilekatkan harus mampu dit-

epis melalui hasil yang objektif. “Ketika terdapat parpol yang tidak memenuhi syarat, jangan dipaksakan untuk lolos menjadi peserta pemilu. Tanggungjawab pelaksanaan ini menjadi penting,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Pasalnya, kata Taufiq, ketika KPU memansang standart lemah dalam proses verifikasi, tujuan penguatan partai sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang parpol dan dijadikan syarat di UU Pemilu tidak akan tercapai.

“Guna menunjang hal ini harus ada pengawasan yang ketat. Publik mesti harus dan wajib mengawasi kinerja KPU,” ucapnya. (rf/si) foto:parle

Segera Bentuk Badan Otoritas Pangan Nasional Pengganti Bulog

Pemerintah diminta segera membentuk badan otoritas pangan nasional yang bertanggung jawab terhadap kemandirian dan kedaulatan pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Apalagi rencana revitalisasi peran Bulog sebagai lembaga penyangga stok dan harga pangan sulit terwujud akibat dihadang peraturan dan perundang-undangan yang ada.

“Badan otoritas yang akan dibentuk itu memiliki wewenang yang lebih dibanding Bulog karena tidak hanya sebagai penyangga, namun juga dapat merumuskan berbagai kebijakan jangka panjang,” kata anggota komisi IV DPR Mohammad Prakosa di Jakarta, Rabu (1/8).

Menurutnya, badan yang melibatkan berbagai instansi pemerintah pusat maupun daerah itu dapat menyatukan kebijakan pangan dalam satu atap. Selain itu, keberadaan badan itu juga dapat meminimalisasi gesekan antar kementerian dan lembaga negara, karna telah bergabung dalam otoritas tersebut. “Jika tidak ada badan yang fokus menangani masalah ketersediaan pangan di dalam negeri, kemandirian



Anggota Komisi IV DPR RI Mohammad Prakosa

pangan tidak akan mungkin terwujud,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah sebenarnya berencana merevitalisasi peran

Bulog sebagai stabilisator harga serta penyangga kebutuhan pangan dalam negeri. termasuk mengkaji komoditas pangan yang g yanakan menjadi tanggung jawab Bulog. Namun, Bulog sekarang yang berstatus perum akan sulit menjadi badan penyangga pangan karna masih wajib mencari untung secara komersial. Arytinya peran bulog tidak lagi bisa seperti sebelum tahun 1998.

“saat ini fungsi Bulog sebagai badan penyangga pangan nasional dirampingkan hanya untuk mengurus beras. Ini sesuai saran Dana Moneter Internasional (IMF) pada era 1998 lalu. Bahkan Bulog pun hingga saat ini masih kesulitan untuk menangani beras,” tuturnya. (si/ko) foto:parle

Presiden AIPA Marzuki Alie Berjariah ke Lokasi Kremasi Mahatma Gandhi

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di India, Presiden AIPA Marzuki Alie beserta Delegasi ASEAN Inter Parliamentary Assembly mengunjungi lokasi kremasi tokoh pendiri India Mahatma Gandhi di Rajghat, New Delhi, India, Senin (30/7).

Delegasi ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) yang turut serta kali ini yakni Surahman Hidayat dan Sidharto Danusubroto dari parlemen Indonesia, Seng Han Thong dari parlemen Singapura, Winai Sompang dari parlemen Thailand, dan Ngo Duc Manh dari parlemen Vietnam. Delegasi AIPA juga didampingi oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk India, Andi Muhammad Ghalib.

Pada kesempatan itu, Delegasi AIPA menyempatkan menaruh karangan bunga di lokasi kremasi Mahatma Gandhi. Usai berkunjung ke Rajghat, Delegasi AIPA melakukan kunjungan ke parlemen India atau Lok Sabha yang diterima oleh Ketua Lok Sabha, Miera Kumar bersama pimpinan dan anggota Lok Shaba.

Marzuki Alie mengatakan, kunjungan Delegasi AIPA ke India bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara India dan Asean, khususnya antara Lok



Ketua DPR RI Marzuki Alie (kiri) saat berjariah ke lokasi kremasi Mahatma Gandhi di India

Sabha dan AIPA.

Menurut dia, hubungan dialog antara ASEAN dan India sudah dibangun sejak 1972 melalui dialog sektoral, kemudian hubungan tersebut ditingkatkan menjadi mitra dialog penuh pada

1995. "Sejak saat itu, hubungan kedua pihak makin kokoh yang ditandai dengan diselenggarakannya sejumlah kegiatan seperti ASEAN-India Summit yang berlangsung tahunan," katanya. (Rud.Tvp) foto:parle

DPR Desak KPK Tingkatkan Status Century

DPR mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera meningkatkan status Bank Century dari penyelidikan menjadi penyidikan. Peningkatan status itu perlu dilakukan agar kasus yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,7 triliun itu dapat segera dituntaskan.

Ketua Tim Pengawas (Timwas) Kasus Century DPR, Priyo Budi Santoso, Senin mengingatkan para pemimpin KPK yang berjanji kasus Century akan selesai sebelum Desember 2012.

"Saya optimis pada akhirnya kasus ini dapat diselesaikan dan dituntaskan. Terlebih lagi, pimpinan KPK sebelumnya pernah menyampaikan adanya perkembangan dalam penyelidikan kasus Bank Century," ujar Priyo. Terkait dengan itu, Priyo berjanji Timwas Century DPR akan terus mengawal dan mendesak hal serupa dalam masa persidangan mendatang.

Sebelumnya diberitakan, Badan



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso

Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan audit forensic mereka ke KPK. Dalam laporannya, ada dua temuan menarik dari audit forensic BPK. Pertama, adanya aliran dana dari Bank Century ke PT Media Nusa Pradana (Jurnal Nasional). Kedua, aliran dana ke HEW, yang diduga politisi partai Demokrat. Sejauh ini KPK masih mendalami temuan BPK tersebut.

DPR sendiri sejak awal menemukan lebih kurang 60 pelanggaran pada saat proses merger, pengucuran fasili-

tas pinjaman jangka panjang (FPJP), hingga penetapan kasus Bank Century yang perlu di bail-out.

Sementara anggota Timwas kasus Century, Bambang Soesatyo (F-PKG), berharap KPK dalam waktu dekat ini membuat kejutan dengan menyebutkan nama tersangka terkait skandal keuangan terbesar pasca reformasi ini.

Bahkan, kata dia, KPK perlu segera menyurati Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait pemeriksaan ulang terha-

dap kesehatan Siti Fadrijah, mantan pejabat BI yang disebut sebagai saksi kunci dalam proses bail-out Bank Century.

Saat rapat bersama Timwas Century pada 13 Juni 2012 lalu, Ketua KPK Abrahan Samad mengaku pihaknya tidak bisa begitu saja menerima keterangan dokter pribadi Fajriyah yang menyatakan pasiennya menderita lumpuhan dan disfungsi memori. "KPK akan mencari second opinion dari dokter lain," kata Samad. (rf/si)foto:parle

Reformasi Polri Dinilai Belum Berjalan

Kebijakan Polri untuk tetap bertahan menangani kasus dugaan korupsi simulator pengujian SIM dinilai sebagai upaya menjaga kepentingan kepolisian. Penilaian ini disampaikan anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Wartawan, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/8/12).



Anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari

“Sebetulnya lebih kepada kepentingan Polri. Ada agenda politik penanganan hukum untuk kepentingan kepolisian. Atas nama korps, para pejabat Polri berusaha menangani kasus yang diduga melibatkan dua jenderal itu. Mereka melihat eksese-eksese yang bisa terjadi jika ditangani KPK,” tandas Eva.

Ia mengingatkan aturan perundang-undang terkait permasalahan ini sudah sangat jelas yaitu pasal 50 ayat 3 yang berbunyi; Jika KPK mulai menyidik, Kepolisian dan Kejaksaan tidak berwenang lagi menyidik kasus yang sama. Ayat 4; Dalam hal penyidikan dilakukan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan KPK, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Lebih jauh politisi FPDIP ini menegaskan mengemukakan kasus simulator uji SIM ini bisa dikatakan sebagai tolok ukur kinerja Polri dalam menjalankan agenda reformasi. “Mabes Polri memiliki agenda terselubung dalam kasus itu. Salah satunya adalah karena adanya kekhawatiran kasus itu akan membongkar korupsi di Polri. Masyarakat akhirnya paham ternyata reformasi di tubuh Polri belum berjalan,” lanjutnya.

Bicara pada diskusi yang sama pe-

ngamat kepolisian Bambang Widodo Umar menilai untuk menjaga kelancaran proses penyelidikan yang dilakukan KPK perwira tinggi Polri yang diduga terlibat harus dinonaktifkan. Kebijakan ini menurutnya dapat menjadi contoh yang baik bagi bawahan dan pesan positif pada publik.

“Sebaiknya dinonaktifkan dulu, gubernur dan perwira-perwira yang lain dinonaktifkan dulu. Kebijakan ini

akan memberi pengaruh terhadap bawahannya. Mereka akan mencontoh yang baik dan meninggalkan yang buruk. Masyarakat menginginkan petinggi-petinggi polisi yang bersih,” paparnya.

Sejauh ini dua jenderal kepolisian telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK telah menetapkan dua nama Inspektur Jenderal Djoko Susilo, mantan Kepala Korps Lalu Lintas, Mabes Polri

yang saat ini menjabat Gubernur Akpol. Kemudian Brigadir Jenderal Didik Purnomo, Wakil Kepala Korps Lalu Lintas yang saat itu sebagai pejabat pembuat komitmen.

KPK menetapkan tersangka lebih awal sejak tanggal 27 Juli, sedangkan Kepolisian tanggal 1 Agustus. Dari 5 tersangka versi polisi hanya satu perwira tinggi yaitu Brigjen Pol. Didik Purnomo. (iky)

Komisi X DPR Apresiasi Kerjasama Trisakti Dan PBSI

Komisi X DPR mengapresiasi Universitas Trisakti yang menandatangani kerjasama dengan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) untuk menyelenggarakan prakuliahan atlit Pelatnas Bulu Tangkis. “Kalau Universitas Trisakti menyelenggarakan dan memberi kesempatan para atlit Bulu Tangkis, atau sebaiknya untuk semua atlet, itu bagus sekali untuk masa depan setelah mereka tidak berprestasi lagi” kata anggota komisi X DPR Dedi Gumelar, di Jakarta, Selasa, (31/7)

Dia menilai kerjasama itu adalah gagasan cerdas dan simpatik yang perlu di dukung. Miing menambahkan seharusnya hal seperti ini datang dari pemerintah termasuk kebijakan mensejahterakan masa depan atlet.

Reni Marlinawati Amin, anggota komisi X dari fraksi PPP menyatakan kerjasama itu merupakan bentuk adanya kesadaran baru bahwa atlet tidak hanya butuh kecerdasan saat berprestasi dalam bidang olahraga, namun juga harus memiliki kecerdasan intelektual. Dia bercerita, sedikit atlet Indonesia yang berprestasi dimasa muda, namun sulit dimasa tua. Kebanyakan dari mereka menghabiskan waktunya untuk latihan, sementara pendidikan formal dilupakan.

“Padahal mereka juga berhak mendapatkan kecerdasan intelektual yang merupakan modal untuk masa depan yang takkan hilang dimakan waktu. Kami mengucapkan terimakasih terhadap PBSI dan Universitas Trisakti atas kerjasama ini,” kata Reni.

Dia melanjutkan pihaknya berharap langkah PBSI dan Trisakti itu ditiru dan dilanjutkan oleh lembaga lainnya. Dia berjanji akan segera



Anggota Komisi X DPR RI Dedi Gumelar,

mendorong komisi X DPR secara resmi menyerukan agar Kemenpora dan Kemendiknas membuat perjanjian untuk mendorong kerjasama sejenis. “Kita akan mendorong Kemendiknas dan Kemendikbud mengikuti langkah ini” kata politisi PPP itu.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota komisi X dari partai

Golkar, Zulfadli yang menyatakan pihaknya sudah seajaklama mendorong kementerian pemuda dan olahraga memberikan perhatian pada masalah pendidikan atlet. Kerjasama antara PBSI dan Universitas Trisakti bisa dijadikan bench mark soal bagaimana pembinaan masa depan atlet Indonesia. “Hal itu patut diapresiasi

agar masa depan atlet lebih terjamin,” tandas Zulfadhli.

Terkait Kerjasama Universitas Trisakti dan PBSI untuk menjalankan perkuliahan atlet yang dibina Pelatnas PBSI, Menurut Rektor Universitas Trisakti, Thoby Mutis kerjasama itu diawali dalam penyelenggaraan pendidikan diploma III Akuntansi Perpajakan. Namun dia menekankan bahwa kerjasama itu tidak menutup kemungkinan untuk terus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih

tinggi.

“Program D3 perpajakan ini hanya program awal karena kuliahnya singkat. Tidak menutup kemungkinan, bahwa atlet PBSI dapat terus meningkatkan jenjang pendidikannya hingga program Sarjana, Pasca Sarjana, hingga Doktor,” kata Thoby dalam rilis Universitas Trisakti. Salah satu contoh atlet bulu tangkis itu adalah Frida Sari yang menjalani perkuliahan di Trisakti.

Sementara Ketua umum PBSI

Djoko Susanto menyatakan, pihaknya mengapresiasi kerjasama yang dijalin dengan Trisakti. Bagi PBSI kerjasama ini dapat membuka pintu masa depan para atlet. “Saya yakin para atlet juga memiliki kebanggaan dan merasa terhormat dapat menjalankan kehidupan sebagai Mahasiswa. Saya harap hal ini dapat meningkatkan semangat para atlet dalam meningkatkan kualitas pendidikan formalnya,” kata Djoko. (si/ko) foto: parle

Polri-KPK Bertikai, Presiden SBY Perlu Bersikap

Drama tertahannya penyidik KPK di Kantor Korps Lalu Lintas Mabes Polri selama lebih dari 24 jam membuat publik dan media menyadari telah terjadi perbedaan pendapat serius diantara dua penegak hukum yaitu KPK dan Polri. Presiden SBY sudah seharusnya mengambil sikap agar permasalahan ini tidak berlarut-larut.



Gedung KPK (kiri) dan gedung Polri (kanan)



“KPK dan Kepolisian itu elemen pemberantasan korupsi yang dikomandani oleh Presiden SBY. Jangan lupa polisi berada dibawah presiden langsung. Jadi Presiden SBY punya power untuk arahkan kasus ini seperti apa, mau jadi dagelan, mau jadi titik lompatan untuk efektifitas pemberantasan korupsi, tergantung presiden semua,” kata anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari di Jakarta, Jumat (3/8/12).

la mengingatkan dalam upaya perang terhadap korupsi presiden telah

mengeluarkan 3 instruksi, 2 terkait pemberantasan dan 1 pencegahan. Seharusnya presiden sudah mendapat input atau memahami sendiri permasalahan yang terjadi di lapangan. “O, ternyata problem pemberantasan korupsi itu ternyata ada pada penegak hukum sendiri, lihat saja mereka otot-otot sampai lebih dari 24 jam,” kata Eva.

Bagi politisi PDIP ini sudah sepatutnya KPK mengambil seluruh penanganan kasus dugaan korupsi simulator uji SIM yang telah merugikan negara

miliaran rupiah ini. Pasal 50 ayat 3 dan 4 UU no .30/2002 jelas menegaskan kewenangan itu ada pada KPK. Disamping itu publik sudah mencatat Inspektora Polri pernah mengatakan tidak ada unsur korupsi dalam proyek tersebut.

“Saya juga mendapat input salah seorang tersangka Bambang Sukotjo yang pernah melaporkan kasus ini digebuki polisi. Ada oknum polisi kemudian merampok kekayaannya, didepan anak istri dipukuli, jadi tidak legitimate lagi polisi melanjutkan kasus ini, nanti masyarakat tambah gondok. Kapolri harus jadikan kasus ini untuk menunjukkan komitmen serius membersihkan dan melakukan reformasi kultural di kepolisian,” paparnya.

DPR menurutnya dalam posisi akan terus mengawasi jalannya penanganan kasus ini. Keberhasilan penanganannya akan menunjukkan pada publik, ‘area untouchable’ selama ini yaitu TNI dan Polri sudah mulai dimasuki KPK. Ini benar-benar tantangan krusial dan kalau ini berhasil akan menjadi lompatan dalam pemberantasan korupsi di pemerintahan Presiden SBY. (iky) foto:parle

Berikan Harga Terbaik Bagi Petani

Ributnya masyarakat atas kelangkaan dan kenaikan harga kedelai baru-baru ini membuat semua pihak menjadi kalang kabut. Pemerintah lantas mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan bea masuk impor. Padahal, hal justru akan sangat merugikan petani dan menghalangi kemandirian ketahanan pangan.

Politisi senior dari Fraksi Partai Golkar DPR Siswono Yudhosodo justru mengingatkan agar pemerintah tidak gegabah menurunkan bea masuk impor kedelai. “Jadi pemerintah jangan gegabah menurunkan bea masuk. Kebijakan pemerintah berupa jalan pintas dengan menurunkan bea masuk tidak menguntungkan petani. Tapi yang diuntungkan hanya para pelaku kartel dan petani luar negeri” kata Siswono beberapa waktu lalu.

Menurut Siswono, kebijakan tersebut juga akan membunuh kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah seharusnya jangan langsung membebaskan bea impor kedelai untuk kepentingan jangka panjang. Dia menyakini masyarakat dapat menerima situasi ini jika ada kepastian dari pemerintah. “Saya yakin rakyat siap perihatin sebentar sepanjang ada gambaran kedepan jadi lebih baik. Sekarang ini karena harga kedelai naik, rakyat terima ukuran tempe diturunkan. Tapi pada saat bersama, pemerintah harus yakinkan rakyat bahwa kedepan stock kita akan cukup. Tanpa ada harga yang menarik, tidak akan bisa menaikkan harga produksi,” ucapnya.

Menurut dia, seharusnya pemerintah justru harus bisa mempertahankan stabilitas harga agar jangan jatuh. Dengan demikian akan menarik petani untuk menanam kedelai karena menguntungkan. Harga yang tinggi justru menjadi instrumen positif untuk meningkatkan produksi dan dalam jangka panjang justru akan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Siswono mencontohkan di Thailand yang memiliki surplus 12 juta ton, justru pemerintahnya membeli dengan harga yang tinggi supaya tidak membuat harganya turun. Begitupun di India setiap tahunnya negara memberi 20% produksi kedelai nasionalnya agar harganya tidak turun

“tanpa harga yang menarik maka tidak akan ada peningkatan produksi

karena petani tidak dapat untuk sehingga tidak menarik petani untuk menanam kedelai,” kata siswono.

Siswono menjelaskan seharusnya untuk harga kedelai saat ini berada dikisaran Rp 7.200/kg sehingga menguntungkan bagi petani. Sementara harga gula tidak kurang dari Rp 10.500/kg dan harga beras yang memadai sekitar Rp 3000 sementara harga jagung sekitar antara Rp 2.400 – Rp 2.700.

Siswono mengatakan, berdasarkan pengalamannya menanam kedelai dilahan 1 hektar total biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan untuk 1kg kedelai mencapai Rp 5.200. dengan demikian, jika harga kedelai impor Rp 5000/kg kata dia, maka akan mematikan petani lokal.

Kerugian atau minimnya keuntungan yang dialami petani lokal, lanjutnya, membuat terus menyusutnya menanam kedelai. Tahun 1988, kata dia, area tanam kedelai mencapai 1,6 juta hektar. Ketika itu produksi nasional mencapai 1.869.000 ton. “Hari ini luas tanah kurang dari 600.000 hektar, susut karena petani tidak untung. Produksi nasional sekarang tinggal 700.000 ton,” kata siswono. Adapun kebutuhan nasional sebesar 2,6 juta ton.

Siswono mengungkapkan data tahun 1988, area tanam kedelai di Indonesia seluas 1,6 juta hektar dengan produksi mencapai total 1,869 juta ton. “pada saat itu biaya masuknya 30% sehingga



Anggota DPR dari fraksi Golkar, Siswono Yudhosodo, harganya tidak jatuh,” kata siswono.

Anggota komisi IV DPR ini meminta pemerintah tidak hanya fokus memperhatikan masalah kelengkapan kedelai. Tapi juga memperhatikan komoditas pangan lainnya. “Kalau hari ini, kita meributkan kedelai jangan kaget kalo sebentar lagi kita meributkan harga jagung, gula, gandum. Hal ini disebabkan kita selalu bergantung pada import. Kita selalu kurang impor akhirnya biaya masuk diturunkan sampai 0%. Pemerintah jangan gegabah menurunkan biaya masuk. Saya yakin rakyat siap prihatin sebentar tapi ada gambaran dimasa depan ada penyelesaian masalah,” kata siswono

Dewan Penasehat HKTI ini mengungkapkan, semestinya pemerintah harus memperhatikan masalah pangan dalam skala jangka panjang. “kebijakan jangka panjang yang konsisten. Tidak seperti sekarang,” paparnya. (tt) foto: parle



Pertemuan Tim Kunker Komisi VII DPR dipimpin Zainudin Amali dengan direksi dan jajaran PT. PLN Gorontalo. Senin (16/07), Foto: IW



Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR Mahrus Munir menyerahkan bantuan program asistensi sosial lansia kepada M. Ramli (Kepala PSTW Puspa Karna) di Lombok, NTB. Selasa (17/07), Foto: IKY



Dialog Tim Kunker Komisi X DPR ke Batam dipimpin Asman Abnur dengan Diknas dan Kepala Sekolah terkait anggaran operasional perpustakaan yang terbatas. Selasa, (17/07), Foto: IW/IP

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS **ASPIRASI DPR RI** di **08119443344**
Layanan Informasi Publik di **www.ppid.dpr.go.id**